



BUKU I



**RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Gerilya Barat No.5 Tanjung

Purwokerto 53144

Telp/Fax : 0281-7772533

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
II. Analisis <i>Driving Force, Pressure, State, Impact</i> dan <i>Response</i> Isu Lingkungan Hidup Daerah	2
2.1. Tata Guna Lahan.....	2
2.2. Kualitas Air	4
2.3. Kualitas Udara.....	5
2.4. Risiko Bencana.....	6
2.5. Perkotaan	7
2.6. Tata Kelola	8
III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	9
IV. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	13

Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

I. Pendahuluan

Kabupaten Banyumas secara geografis terletak pada posisi 7° 15'05" - 7° 37'10" Lintang Selatan dan antara 108° 39'17" - 109° 27'15" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas yaitu 132.759,56 Ha atau 1.327,59 km². Memiliki 27 kecamatan (301 desa dan 30 kelurahan).

Kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan seperti sampah, alih fungsi lahan, serta kualitas dan kuantitas air. Upaya perbaikan lingkungan terus dilakukan melalui berbagai inovasi kebijakan/program pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan upaya / inovasi tersebut dapat diperoleh dengan melibatkan dan membangun sinergitas dengan semua pemangku kepentingan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan dan membuka informasi terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, di antaranya hasil analisa faktor-faktor yang menjadi tekanan terhadap lingkungan, serta upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan mempermudah akses informasi oleh pemangku kepentingan sehingga arah keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dijalankan demi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup, menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Dokumen ini merupakan dokumen yang menampilkan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Metode analisa data yang digunakan dalam dokumen ini adalah DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response*).

II. Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact* dan *Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

2.1. Tata Guna Lahan

a. Driving Force

Faktor pendorong dari tata guna lahan yang signifikan di Kabupaten Banyumas adalah peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan kebutuhan lahan. Lahan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan melakukan aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan beban terhadap lahan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi tata guna lahan di suatu wilayah, seiring bertambahnya kebutuhan serta keinginan untuk memperbaiki/ mensejahterakan dari kehidupan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena standar hidup sejahtera seseorang akan meningkat dengan membaiknya ekonomi seseorang. Kebutuhan tersebut secara tidak langsung berkaitan pula dengan kebutuhan ruang atau lahan, serta berpengaruh terhadap nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

b. Pressure

Adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung menyebabkan konversi penggunaan lahan yang cukup besar, terutama kebutuhan untuk permukiman dan industri, sehingga menyebabkan tekanan pada perubahan fungsi lahan. Selain alih fungsi lahan, aktivitas pertanian yang menerapkan pola pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan kemampuan lahan akan memberi beban terhadap lahan karena melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

c. State

State (status/kondisi) tata guna lahan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- ✚ Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Hutan Lindung 9.456,72 ha, Sempadan Sungai 2.962,39 ha, Kawasan Rawan Tanah Longsor 33.370,44 ha, Kawasan Rawan Banjir 5.058,42 ha, dan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi 4.152,01 ha;
- ✚ Penggunaan lahan utama Kabupaten Banyumas adalah luas lahan sawah 38.077,22 Ha, luas lahan hutan 28.729,99 Ha, luas lahan non pertanian 19.415,40 Ha, dan luas badan air 638,59 Ha;
- ✚ Luas hutan berdasarkan fungsi dan status yaitu hutan produksi 20.744,77 ha, hutan lindung 7.985,22 ha, hutan negara (kawasan hutan) 28.729,99 ha, hutan kota 10,09 ha, dan taman keanekaragaman hayati (taman kehati) 22,9 ha;
- ✚ Luas total lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yaitu 271.358,88 ha. Terbagi menjadi lahan sangat kritis 4.525,29 ha, kritis 36.716,81 ha, agak kritis 111.808,69 ha, potensial kritis 93.732,94 ha, dan tidak kritis 24.575,15 ha;
- ✚ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 43,96 masuk dalam kategori kurang. Perlu upaya nyata untuk meningkatkan nilai IKTL, antara lain dengan menambah luasan RTH yang menjadi kewenangan Permerintah Daerah.

d. Impact

Meningkatnya perubahan penggunaan lahan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan dan aktivitas pertanian akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, di antaranya akan mempengaruhi produktifitas lahan, kualitas udara, perubahan iklim, berkurangnya debit air tanah, mengganggu ekosistem yang ada dan dapat meningkatkan kerawanan terhadap banjir dan longsor. Aktivitas pertanian yang tidak sesuai dengan kondisi kemampuan lahan dapat mengakibatkan kerusakan tanah yang berdampak pada penurunan dan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, lahan pertanian yang lebih banyak ditanami komoditas musiman berpotensi menimbulkan kekeringan karena tidak bisa menyimpan

cadangan air pada musim kemarau. Dampak lainnya adalah menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

e. Response

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap tata guna lahan antara lain melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

2.2. Kualitas Air

a. Driving Force

Driving force (faktor pendorong) penurunan kualitas air di Kabupaten Banyumas adalah peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah limbah cair, adanya kemiskinan yang membentuk permukiman kumuh, serta potensi ketersediaan dan kebutuhan air. Keempat faktor tersebut juga menjadi faktor pendorong terhadap menurun atau meningkatnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA), karena berperan terhadap tinggi / rendahnya parameter-parameter atau zat-zat yang terkandung dalam air sungai yang menjadi dasar penghitungan nilai IKA.

b. Pressure

Aktivitas yang berpotensi sebagai pressure (tekanan) terhadap penurunan kualitas air diantaranya sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pertumbuhan industri yang semakin meningkat, aktivitas pertanian dengan penggunaan pupuk anorganik serta kegiatan peternakan yang belum berizin dan belum mengelola limbahnya dengan baik, sehingga langsung membuang limbah ke sungai.

c. State

Kondisi kualitas air di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- ✚ Kualitas air yang dipantau adalah kualitas air sungai, air danau/situ/waduk/embung, air hujan, dan air sumur;
- ✚ Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 30 titik dengan menggunakan metode *pollution index* (PI) sebagai dasar evaluasi pencemaran air. Hasilnya, nilai IKA Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah 56,18;

- ✚ Secara umum kualitas air danau/situ/waduk/embung, air sumur dan air hujan masih dalam kategori baik/ memenuhi baku mutu;
- ✚ Kabupaten Banyumas memiliki potensi ketersediaan air sebesar 1.303.194.059 m³/tahun, dengan kebutuhan pada sektor penduduk sebesar 67.165.548 m³/tahun, sektor pertanian 945.209.774 m³/tahun, serta sektor industri 19.032.743 m³/tahun.

d. Impact

Secara umum, dampak penurunan kualitas air adalah menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan menurunnya kesehatan masyarakat.

e. Response

Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan kualitas air antara lain dalam bentuk kegiatan pembangunan jamban untuk mendukung program ODF (*Open Defecation Free*), pengawasan dan pembinaan terhadap industri/pelaku usaha penghasil air limbah, pengujian kualitas air, program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dan pembentukan FMPS (Forum Masyarakat Peduli Sungai).

2.3. Kualitas Udara

a. Driving Force

Faktor pendorong dalam perubahan kualitas udara di Kabupaten Banyumas adalah laju pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, serta penggunaan bahan bakar rumah tangga, kendaraan bermotor, dan Industri. Aktivitas-aktivitas tersebut menghasikan gas buang yang dapat mencemari dan menurunkan kualitas udara.

b. Pressure

Pressure (tekanan) yang mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Banyumas adalah aktivitas transportasi, aktivitas industri, dan penambahan panjang ruas jalan yang kurang signifikan (tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan sehingga menyebabkan polusi udara dan kemacetan).

c. State

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 85,16 (kategori baik). Pengukuran IKU dilakukan menggunakan metode *passive sampler* dengan parameter ukur Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

d. Impact

Dampak yang ditimbulkan dari penurunan kualitas udara antara lain berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan terjadinya perubahan iklim, salah satunya ditunjukkan dengan kejadian musim yang tidak menentu.

e. Response

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi penurunan kualitas udara adalah dengan melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan penataan, pengembangan, dan pembangunan, kegiatan penghijauan, serta pemantauan emisi kendaraan bermotor.

2.4. Risiko Bencana

a. Driving Force

Faktor pendorong risiko bencana di Kabupaten Banyumas adalah faktor alam terkait kondisi fisik alam dan faktor manusia terkait aktivitas bawasanya yang pada akhirnya secara tidak langsung mengakibatkan bencana.

b. Pressure

Tekanan terhadap risiko bencana di Kabupaten Banyumas adalah adanya perubahan kondisi lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, serta kondisi wilayah yang berada di wilayah rawan bencana.

c. State

Bencana yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yaitu banjir terjadi sebanyak 13 kejadian di 12 kecamatan, tanah longsor terjadi

sebanyak 42 kejadian di 20 kecamatan, angin ribut / puting beliung terjadi sebanyak 9 kejadian di 6 kecamatan, dan kebakaran rumah terjadi sebanyak 7 kejadian di 7 kecamatan.

d. Impact

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, kerusakan lahan pertanian, kerusakan lingkungan, dll.

e. Response

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menghadapi risiko bencana adalah dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana yang terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang, berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan kebencanaan, bekerjasama dengan OPD teknis lain untuk mengadakan kajian mengenai bencana sesuai dengan kewenangannya, serta meluncurkan aplikasi SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas) dan SIDAMAS (Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas).

2.5. Perkotaan

a. Driving Force

Pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi pendorong meningkatnya layanan dan kebutuhan perkotaan seperti permukiman, perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri, dan fasilitas umum lainnya akan menimbulkan permasalahan yang berdampak kurang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat.

b. Pressure

Pressure (tekanan) perkotaan yaitu karena adanya jumlah penduduk miskin, ketersediaan fasilitas sanitasi kota di wilayah permukiman, pengelolaan sampah perkotaan, dan ketersediaan RTH.

c. State

Status / kondisi perkotaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yaitu luas kawasan kumuh sebesar 115,7 Ha, jumlah Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) yang tertangani sebanyak 2.189 unit, serta jumlah timbulan sampah sebanyak 1.790 m³/hari.

d. Impact

Dampak negatif dari aktivitas perkotaan antara lain kepadatan penduduk yang akan menimbulkan masalah permukiman kumuh, jumlah penduduk miskin semakin meningkat, permukiman kumuh akan menciptakan RTLH (rumah tidak layak huni) yang umumnya disertai dengan ketiadaan fasilitas BAB sendiri yang layak dan sehat, sumber air minum yang sehat dan aman untuk kesehatan, penurunan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan hunian, serta berkurangnya RTH dengan semakin banyaknya pembangunan gedung atau fasilitas yang menunjang aktivitas perkotaan.

e. Response

Respon Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap perkotaan yaitu pengentasan Rumah Tidak Layak Huni, penanganan permukiman kumuh, penurunan jumlah penduduk miskin, pengurangan dan penanganan masalah sampah salah satunya melalui pembangunan TPS 3R dan PDU (Pusat Daur Ulang), pembentukan bank sampah, serta penerapan aplikasi SALINMAS dan JEKNYONG.

2.6. Tata Kelola

a. Driving Force

Faktor pendorong tata kelola yaitu transparansi anggaran dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berpihak pada pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas.

b. Pressure

Tekanan terhadap tata kelola di Kabupaten Banyumas adalah adanya

aduan dari masyarakat terkait peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. State

Kondisi terhadap tata kelola di Kabupaten Banyumas adalah terkait jumlah personi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebanyak 166 orang PNS dan 427 orang PHL (Pegawai Harian Lepas). Selain itu, terdapat 46 KSM/LSM terdaftar yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

d. Impact

Dampak yang terjadi jika terdapat kendala atau kegagalan dalam tata kelola antara lain kurang maksimalnya pengawasan atas peran pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam pelanggaran kasus-kasus lingkungan, pengawasan dan pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat bisa tidak terakomodir, akses informasi masyarakat mengenai kondisi lingkungan hidup Kabupaten Banyumas menjadi terbatas, dan timbulnya pengabaian penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus lingkungan.

e. Response

Respon Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap tata kelola yaitu dengan pengadaan pegawai harian lepas (PHL), penyediaan sarana pengaduan kasus lingkungan, dan pengembangan jejaring kerja.

III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Dari hasil analisis DPSIR Kabupaten Banyumas serta berdasarkan kesepakatan bersama melalui rapat pembahasan dan penetapan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut 1) Sampah, 2) Kualitas dan Kuantitas Air, 3) Bencana Alam, dan 4) Alih Fungsi Lahan. Berikut kerangka DPSIR dari isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas:

a. Sampah

- **Driving Force** : Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan proses pembangunan baik ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan bidang lainnya dengan segala aktivitasnya;

- **Pressure** : Meningkatnya volume timbunan sampah, kapasitas TPA yang masih beroperasi sudah tidak dapat menampung sampah secara maksimal, salah satu TPA menggunakan tanah milik warga dengan sistem sewa, dan cakupan pelayanan sampah yang sangat luas;
- **State** : Kab. Banyumas memiliki 2 TPA yang masih beroperasi yaitu TPA Tipar Kidul dan TPA Cunil, timbunan sampah di Kab. Banyumas mencapai 1.790 m³/hari, terdapat anggaran pengelolaan persampahan yang cukup besar, terdapat inovasi pengelolaan sampah "SUMPAAH BERUANG" dan terdapat 145 bank sampah yang masih aktif;
- **Impact** : Pencemaran air, udara, tanah, dan lingkungan tidak bersih, tidak nyaman, dan tidak sehat;
- **Response** : Menargetkan pengurangan sampah 30% & penanganan sampah 70% (Perbup No.45 Tahun 2018), pembentukan 6 UPKP (Unit Pengelola Kegiatan Persampahan), pembangunan 39 fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS/PDU/TPS3R, penguatan Bank Sampah, serta penerapan program aplikasi sampah e-sampah "SALINMAS" (Sampah Online Banyumas) dan JEKNYONG.

b. Kualitas dan Kuantitas Air

- **Driving Force** : Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah limbah cair, kemiskinan dan permukiman kumuh, potensi ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Banyumas;
- **Pressure** : Sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pertumbuhan industri, dan aktivitas pertanian dan peternakan;
- **State** : Kondisi pemantauan kualitas air sungai, air danau, air sumur, dan air hujan, nilai IKA Kab. Banyumas Tahun 2021 adalah 56,18, terdapat 105 perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan air tanah;
- **Impact** : Berpengaruh pada kesehatan masyarakat, limbah industri, pupuk dari aktifitas pertanian, limbah dari aktifitas peternakan berpotensi menurunkan kualitas air, konflik penggunaan air antara untuk aktifitas rumah tangga dan aktifitas pertanian;

- **Response** : Pembangunan IPAL Komunal dan jamban untuk mendukung program ODF, melaksanakan program STBM, melakukan pemantauan kualitas air sungai, air danau, air sumur, dan air hujan, kewajiban penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, pembentukan dan pembinaan FMPS, inventarisasi dan pembinaan P3A, GP3A, dan IP3A, menjaga sumber mata air, penerapan sistem pemanenan air hujan, pembuatan sumur resapan, pembangunan/ refitalisasi embung, serta menambah luasan RTH.

c. Bencana Alam

- **Driving Force** : Faktor alam terkait kondisi fisik alam Kabupaten Banyumas, faktor manusia terkait aktivitas bawaan yang pada akhirnya secara tidak langsung mengakibatkan bencana;
- **Pressure** : Adanya perubahan kondisi lingkungan yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, serta kondisi Kabupaten Banyumas yang berada di wilayah rawan bencana;
- **State** : status Gunung Slamet waspada dari bulan Oktober 2020 berada pada level I (normal), banjir terjadi sebanyak 13 kejadian di 12 kecamatan, tanah longsor terjadi sebanyak 42 kejadian di 20 kecamatan, angin ribut / puting beliung terjadi sebanyak 9 kejadian di 6 kecamatan, dan kebakaran rumah terjadi sebanyak 7 kejadian di 7 kecamatan.
- **Impact** : Mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, merusak lahan pertanian, dll;
- **Response** : Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai jenis bencana yang terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang, berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan kebencanaan, bekerjasama dengan OPD teknis lain untuk mengadakan kajian mengenai bencana sesuai dengan kewenangannya, serta meluncurkan aplikasi SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen

Penanggulangan Bencana Banyumas) dan SIDAMAS (Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas).

d. Alih Fungsi Lahan

- **Driving Force** : Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- **Pressure** : Aktivitas industri, aktivitas pertanian, dan kebutuhan perumahan dan fasilitas pendukungnya yang semakin meningkat;
- **State** : Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Hutan Lindung 9.456,72 ha, Sempadan Sungai 2.962,39 ha, Kawasan Rawan Tanah Longsor 33.370,44 ha, Kawasan Rawan Banjir 5.058,42 ha, dan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi 4.152,01 ha, Penggunaan lahan utama Kabupaten Banyumas adalah luas lahan sawah 38.077,22 Ha, luas lahan hutan 28.729,99 Ha, luas lahan non pertanian 19.415,40 Ha, dan luas badan air 638,59 Ha, Luas hutan berdasarkan fungsi dan status yaitu hutan produksi 20.744,77 ha, hutan lindung 7.985,22 ha, hutan negara (kawasan hutan) 28.729,99 ha, hutan kota 10,09 ha, dan taman keanekaragaman hayati (taman kehati) 22,9 ha, Luas total lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yaitu 271.358,88 ha. Terbagi menjadi lahan sangat kritis 4.525,29 ha, kritis 36.716,81 ha, agak kritis 111.808,69 ha, potensial kritis 93.732,94 ha, dan tidak kritis 24.575,15 ha, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 43,96 masuk dalam kategori kurang;
- **Impact** : Bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan menurunnya angka sektor pertanian;
- **Response** : Pembangunan/ pengembangan RTH untuk menambah daerah serapan air, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang, fasilitasi penatagunaan tanah, penembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan, perlindungan tanaman meliputi kegiatan reboisasi dan penghijauan.

IV. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan membuat inovasi mulai dari peningkatan kapasitas lembaga daerah, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, serta inisiatif atau kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam penanganan isu prioritas terkait sampah, kualitas dan kuantitas air, bencana alam, serta alih fungsi lahan. Adapun inovasi yang dikembangkan antara lain:

1. Inovasi terkait isu prioritas Sampah

Sumpah Beruang (Sulap Sampah Berubah Uang)

Latar belakang Kabupaten Banyumas darurat sampah memicu pengagasan inovasi SUMPAAH BERUANG (Sulap Sampah Berubah Uang) yang diinisiasi dan diterapkan di tengah masyarakat. Inovasi ini bertujuan menangani masalah sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Secara ringkas kegiatan inovasi Sumpah Beruang memiliki 3 tahapan yaitu : (a) Mengubah pengolahan manual menjadi mekanis, sehingga prosesnya lebih cepat; (b) Mengubah sampah plastik menjadi barang ekonomis antara lain paving dan genteng, sedangkan sampah organik menjadi pakan magot dan kompos; (c) Sisa/ residu dimasukkan mesin pembakar *pyrolysis non dioxin* dan *non furan*.

2. Inovasi terkait Isu Prioritas Bencana Alam

SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas) dan SIDAMAS (Sistem Informasi Data Kebencanaan Banyumas)

SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Banyumas) merupakan sistem manajemen bencana komprehensif yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan

Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem tersebut dituangkan dalam bentuk aplikasi yang dapat memuat berbagai informasi terkait kebencanaan, kerawanan, hingga pola penanggulangan terpadu, serta tertib administrasi dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, BPBD dan masyarakat dapat memantau suatu wilayah selama 24 jam sesuai koordinat yang ada di peta Banyumas. Aplikasi SIMBEBAS juga dilengkapi dengan informasi sumber logistik bencana baik dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, pelaporan terkait tindakan, penggunaan logistik, dan penanganan bencana di lapangan. Sedangkan SIDAMAS merupakan website yang berisi berita, artikel, informasi kebencanaan, informasi cuaca di Banyumas dan edukasi kepada warga mengenai bencana serta mitigasinya. Perkembangan SiDaMas kedepan juga akan memuat informasi mitigasi bencana, peta rawan bencana, kegiatan terkait pengurangan resiko bencana, pembentukan desa tangguh bencana, dan artikel terkait kinerja BPBD Banyumas.

3. Inovasi terkait Isu Prioritas Alih Fungsi Lahan

📌 SIPENTUNGMAS (Sistem Informasi Pengendalian Tata ruang Banyumas)

SIPENTUNGMAS merupakan aplikasi yang berbasis web dan android untuk mengefektifkan dan memudahkan pelaporan, identifikasi, dan pencatatan pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan. Aplikasi ini juga sekaligus dapat melakukan monitoring terhadap aktivitas alih fungsi lahan yang terkait dengan permohonan perizinan berusaha dari masyarakat. Tujuan pengembangan aplikasi SIPENTUNGMAS efisiensi dan efektifitas kegiatan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi, meliputi:

- a. Pada Jangka Pendek, adalah menyusun sistem pengendalian bagi intern tugas Bidang Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

- b. Jangka Menengah dan Panjang adalah mengintegrasikan sistem pengendalian dengan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan perizinan di Kabupaten Banyumas (termasuk pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan). Apabila suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata ruang, aktivitas alih fungsi lahan terbatas pada lokasi yang diizinkan serta ada komitmen untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan di lokasi tersebut. Sebaliknya, jika suatu kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka besar kemungkinan adanya aktivitas alih fungsi lahan pada lokasi lahan hijau / lahan pertanian dan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan tidak terpenuhi.

4. Inovasi terkait Isu Prioritas Kuantitas dan Kualitas Air

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan layanan mobil sedot wc/ sedot tinja/ sedot kakus oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim). Layanan ini berada di bawah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
- b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal oleh Dinperkim Kabupaten Banyumas dan jamban sehat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- c. Melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Kewajiban penyusunan AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL/ DELH/ DPLH bagi pelaku usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Banyumas;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan usaha dan/ atau kegiatan;
- f. Pembentukan dan Pembinaan FMPS (Forum Masyarakat Peduli Sungai);
- g. Inventarisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air);

- h. Melakukan pemantauan kualitas air sungai, air sumur, dan air hujan setiap tahun oleh UPT Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas;
- i. Adanya upaya-upaya untuk menjaga sumber mata air, sebagai contoh pembuatan bangunan pelindung mata air di desa Sambeng Wetan Kecamatan Kembaran, Penerapan Sistem Pemanenan Air Hujan, dan Pembuatan Sumur Resapan;
- j. Pembangunan dan Revitalisasi Embung;
- k. Penambahan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan penghijauan atau reboisasi dan menjaga kelestarian hutan kota sebagai salah satu daerah tangkapan air.